

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes Terhadap Manajemen Penggunaan APBDes Dalam Mewujudkan Efektivitas Realisasi Penggunaan APBDes Di Kabupaten Garut

Yoga Pamungkas¹, Jusman Iskandar², Dody Hermana³

^{1, 2, 3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091121020 @pasca.uniga.ac.id

²jusman.iskandar@uniga.ac.id

³doddyhermana@uniga.ac.id

Abstrak

Permasalahan Keuangan Desa yang dihadapi dalam pemerintahan Desa adalah kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah. Manajemen Penggunaan APBDes yang belum optimal diduga sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan APBDes yang belum optimal, yang mengakibatkan belum optimalnya Efektivitas Realisasi APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas APBDes dalam kaitannya dengan kepemimpinan APBDes dalam upaya peningkatan produktivitas APBDes. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dengan metode observasi, angket, angket, dan studi dokumentasi. Namun metode analisis data yang digunakan untuk menetapkan hipotesis ini adalah statistika dengan analisis jalur model atau evaluasi kesenjangan. Kepala Desa sebanyak 63 orang populasi dan responden penelitian ini. Temuan utama dari penelitian hipotesis adalah: "Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes terhadap Manajemen Penggunaan APBDes." Manajemen Penggunaan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Realisasi APBDes. Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah temuan permasalahan penting: pertama, variabel pelaksanaan kebijakan APBDes (X), adalah bahwa masih ada masalah terkait adanya pembinaan Sumber daya yang optimal, yang dilakukan oleh Desa dan Dinas terkait. Kedua, variabel manajemen penggunaan APBDes (Y) adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan Pihak internal yakni Badan Permusyawaratan Desa . Ketiga, pada variabel Efektivitas Realisasi APBDes (Z) adalah kurang optimalnya penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak Desa Berkaitan Dengan Pelaksanaan APBDes. Saran dalam penelitian ini: Pertama, Kepala Desa Harus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan mengenai pelaksanaan Kebijakan APBDes, Kedua, pembinaan manajemen APBDes Ketiga, Mengoptimalkan Metode penyebaran informasi mengenai Pelaksanaan APBDes kepada Masyarakat Umum.

Kata Kunci: APBDes, Efektivitas Realisasi, Manajemen, Pelaksanaan Kebijakan.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang menguasainya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Desa lebih dari sekedar tempat untuk mendapatkan informasi yang berguna; itu juga merupakan sumber pendapatan bagi mereka yang tinggal di sana. Aset Desa sebagai Masyarakat Sumber Pencarian Menjadi Salah Satu Komponen Desa memiliki Jiwa Gotong Royong. Desa ada sumber daya untuk membuat kebutuhan warganya dan membuat kebutuhan dasarnya. 2021 (Pradana).

Satu-satunya alat penting yang berkontribusi pada administrasi yang efektif di area tertentu adalah tata kelola yang sangat baik melalui anggaran.

Untuk membantu memperjelas bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian operasi yang luas seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa awalnya muncul dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Metode pengambilan keputusan harus memperhitungkan hubungan yang terjadi antara asupan, keluaran, dan hasil yang muncul dari pekerjaan yang sedang berlangsung di wilayah Panjang serta peran yang dimainkan masyarakat dalam metode tersebut.

Anggaran merupakan suatu hal penting dalam sebuah Organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Kemudian Rencana keuangan, menjadi cakupan rincian pengeluaran yang diusulkan, kemudian merupakan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam waktu periode tertentu (Sumarsono, 2010:278).

Dalam hal Manajemen Penggunaan APBDes pemerintah Desa mengalami beberapa permasalahan diantaranya, Penggunaan APBDes belum tepat sasaran, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya program yang dibuat oleh pemerintahan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga berakibat kepada kualitas kesejahteraan masyarakat.

Faktor lainnya adalah penyebab dari Belum efektifnya Realisasi APBDes, ini dilihat dari sisi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang belum maksimal, hal tersebut bisa dilihat dari Implementasi kebijakan yang dilakukan masih belum sesuai dengan regulasi yang ada, seperti dalam hal pelaksanaan perancangan Program, belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, pengambilan keputusan terhadap alokasi anggaran kurang tepat dan mekanisme administrasi pelaporan yang masih belum sesuai dengan regulasi.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam efektivitas realisasi APBDes, adalah permasalahan mengenai Sumber Daya Manusia, rendahnya tingkat pendidikan Kepala Desa dan pegawai di lingkungan pemerintahan desa itu sendiri menjadi faktor penghambat lainnya, hal tersebut dilihat dari pemahaman Kepala Desa dan pegawai dalam memahami alur Standar Operasional Prosedur dan regulasi mengenai pelaksanaan APBDes, Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92)

Peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan kajian “Analisis Implementasi Kebijakan APBDes Terhadap Pengelolaan Penggunaan APBDes Dalam Mewujudkan Efektivitas Realisasi APBDes Kabupaten Garut” berdasarkan gambaran fenomena permasalahan dilatar belakang.

2. Metodologi

2.1 Metode yang digunakan

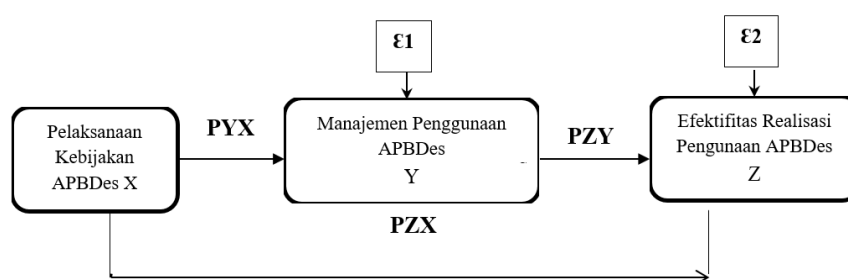
Metode Deskriptif menggunakan metode survey karena didasarkan pada sampel yang representatif dan meminta tanggapan langsung dari responden. Pengumpulan data diprioritaskan setelah selesai karena survey sering mengambil sampel populasi yang representatif. Kesimpulan sebuah populasi sampel disurvei dalam pengaturan terbuka. (Iskandar:2016).

2.2 Variabel Penelitian

Ada tiga jenis variabel penelitian : Variabel independen, yaitu seberapa baik Kebijakan APBDes dipraktikkan : Variabel intervening yaitu manajemen APBDes : dan Variabel dependen seberapa baik Efektivitas Realisasi APBDes dipraktikkan.

2.3 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan APBDes terhadap manajemen Penggunaan APBDes dalam mewujudkan efektivitas Realisasi APBDes. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

2.4 Alat Ukur Penelitian

Sangat baik, Baik, Cukup, Rendah, dan Sangat Rendah adalah lima fase pengukuran ordinal yang digunakan sebagai instrument pengukuran dalam kategori jawaban pada kuesioner.

2.5 Populasi dan Sampel

Kepala Desa di Lima kecamatan di Kabupaten Garut yang berjumlah 63 Orang merupakan kelompok penelitian.

Untuk menilai Objektivitas tujuan penelitian, peneliti menggunakan desain variabel-variabel yang disusun, yang membantu mempercepat proses pengumpulan data dari peserta yang konsisten dengan konsep, keyakinan, saran, dan anggapan mereka. Adapun operasionalisasi variabel penelitian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Dimensi
Variabel X Pelaksanaan Kebijakan APBDes (Edward III, 1980)	1. Komunikasi 2. SDM (Sumebr Daya Manusia) 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Variabel Y Manajemen Penggunaan APBDes (Sumarsono, 2010)	1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Pengawasan Anggaran
Variabel Z Efektivitas Realisasi APBDes (Widjaja dalam Iskandar, 2016)	1. Kebijakan Dasar 2. Strategi 3. Integrasi 4. Kesesuaian Peraturan 5. Sesuai perencanaan

Sesuai dengan metode yang digunakan untuk penelitian, kelompok populasi yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Karangtengah, serta Kec. Sukawening, Kec. Wanaraja, Kec. Pangatikan, dan Kec. Wanaraja. Kec. Karangpawitan dan Kec. Tarogong Kaler menerima sekitar 63 tanggapan. Pembahasan dilakukan mengenai penyelenggaraan administrasi dan kebijakan APBDes sebagai sarana untuk menjamin keberhasilan realisasi APBDes.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan APBDes terdapat temuan bahwa Program Kebijakan APBDes yang masih belum optimal hal tersebut dikarenakan belum adanya pembinaan Sumber daya yang optimal, yang dilakukan oleh Desa dan Dinas terkait. Kemudian masih minimnya Anggaran Pendapatan Asli Desa, sehingga berpengaruh terhadap tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan APBDes secara optimal.

Manajemen APBDes terdapat temuan permasalahan yakni lemahnya pengawasan yang dilakukan Pihak internal yakni Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan baik pengawasan fisik seperti pengecekan Hasil kegiatan-kegiatan dari dana APBDes maupun pengawasan administrasi seperti pengecekan Laporan pertanggungjawaban Dana APBDes. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya manajemen penggunaan APBDes.

Efektivitas Realisasi APBDes kurang optimalnya penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak desa, seperti contoh Hasil musyawarah Desa mengenai perencanaan APBDes hanya diketahui hingga tingkatan RT-RW saja masyarakat luas masih belum banyak yang mengetahui, kurang kerjasama antara perangkat desa dalam melaksanakan program, kemudian Program yang telah dilaksanakan belum sesuai dengan pencapaian Temuan penelitian ini, berdasarkan teori, fakta, dan data, menunjukkan hubungan konseptual yang erat antara variabel yang diteliti. Hubungan yang erat antara gagasan pelaksanaan kebijakan APBDes, pengelolaan penggunaan APBDes, dan efektivitas realisasi APBDes menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan memiliki korelasi yang signifikan.

Tabel 2. Hasil Hipotesis

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F hitung	F tabel	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes (X) Terhadap Manajemen Penggunaan APBDes (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Realisasi APBDes (Z) Di kabupaten Garut	0,6398	13,633	3,148	0,4094	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	F hitung	F tabel	Determinan	Makna Hubungan
Pelaksanaan Kebijakan APBDes Terhadap Manajemen Penggunaan APBDes (Pengaruh Variabel X terhadap Y)	0.4673	4,1277	2,0010	0,2183	Signifikan
Manajemen Penggunaan APBDes Terhadap Efektivitas Realisasi APBDes Di Kabupaten Garut Y Terhadap Z	0,5992	2,0010	4,7947	0.3591	Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes Terhadap Efektivitas Realisasi APBDes (Pengaruh Variabel X terhadap Z)	0,4782	4,2256	2,0010	0,1213	Signifikan

Hasil kajian sebagaimana tercantum dalam tabel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes baik secara serentak maupun berurutan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan APBDes dalam hal peningkatan efisiensi APBDes.

3.1 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Apbdes Terhadap Manajemen Penggunaan Apbdes Dalam Mewujudkan Efektivitas Realisasi Penggunaan Apbdes Di Kabupaten Garut

Pelaksanaan Kebijakan APBDes (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Penggunaan APBDes (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Realisasi APBDes (Z) sebesar 40,94% sedangkan faktor lain diluar faktor Pelaksanaan Kebijakan APBDes sebesar 59,06%.

Adanya kebijakan baru yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Desa Kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan manajerial kepala desa serta pengawasan dari pihak internal yakni BPD yang belum optimal.

Berdasarkan temuan percobaan lapangan tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi komunikasi tentang kebijakan. Sarana utama untuk berkomunikasi adalah dengan mengirimkan makalah (dokumen-dokumen cetak) terkait dengan penciptaan mata uang suatu negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.2 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBdes Terhadap Manajemen Penggunaan APBDes

Sesuai dengan temuan angket yang didukung oleh klaim Ho yang ditolak, faktor Pelaksanaan Kebijakan APBDes jauh melampaui variabel Manajemen Penggunaan APBDes. Pelaksanaan

Kebijakan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Penggunaan APBDes 0,2183 atau sebesar 21,83 % sedangkan sisanya sebesar 0,7817 atau sebesar 78,17 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan APBDes yang tidak dimasukan kedalam model.

yang disebabkan oleh faktor tambahan yaitu staf Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan yang tidak termasuk dalam model analisis. Faktor lain tersebut diantaranya kondisi sosial serta teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang dimiliki perangkat Desa serta dukungan dari pejabat atau atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana dalam hal ini Kepala Desa.

Temuan penelitian ini mendukung anggapan bahwa dengan komunikasi yang pasti, setiap hari, penghancuran, dan perangkat manajerial dapat membantu tim pimpinan APBDes tampil di level tertinggi.

Di atas kertas, pelaksanaan kebatian memiliki satu bagian, yakni komunikasi sudah berjalan dengan baik. meskipun mengetahui bahwa hasil dari integrasi Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dengan Desa Kepala tidak terlalu penting, hal itu tercapai.

3.3 Pengaruh Manajemen Penggunaan APBDes Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Realisasi APBDes.

Berdasarkan hasil pengujian keputusan H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Penggunaan APBDes berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Realisasi Pelaksanaan APBDes. Besarnya pengaruh langsung variabel Pengelolaan APBDes terhadap variabel Efektivitas Realisasi APBDes sebesar 30,39%, dengan sisanya sebesar 69,61% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan faktor kritis dalam meningkatkan keberhasilan Program Pembangunan Perdesaan di Desa Bayongbong Kabupaten Garut.

Meskipun Manajemen Penggunaan APBDes Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara efektif, khususnya di area anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan menggunakan waktu yang tepat, jelas dari hasil penelitian dan evaluasi bahwa ini bukan faktor tunggal yang akan meningkatkan keberhasilan program untuk melakukan pekerjaan di desa. Penting untuk diingat bahwa pengalokasian anggaran belanja yang dilarang berdasarkan program atau proyek yang bersangkutan terdapat pada jenis penjadwalan, terutama sebagai metrik penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa telah dijalankan secara efektif, khususnya di bidang pendistribusian dengan anggaran belanja berdasarkan inisiatif dan program yang sesuai jadwal, terlihat jelas dari temuan studi dan wawancara yang ini bukan satu-satunya variabel yang dapat digunakan untuk mendongkrak efektivitas realisasi APBDes. Penting untuk diingat bahwa pengalokasian anggaran belanja yang dilarang berdasarkan program atau proyek yang bersangkutan terdapat pada jenis penjadwalan, khususnya dalam ukuran penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Penggunaan APBDes memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Realisasi APBDes, dan jika Manajemen Penggunaan APBDes

berjalan dengan optimal maka Efektivitas Realisasi APBDes akan meningkat.

3.4 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan APBDes Terhadap Efektivitas Realisasi APBDes.

Menurut temuan penelitian yang didukung oleh klaim H_0 , parameter Pelaksanaan Kebijakan APBDes berpengaruh signifikan dan positif terhadap Efektivitas Realisasi APBDes sebesar 0,1213 atau sebesar 12,13% sedangkan sisanya sebesar 0,8787 atau sebesar 87,87% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian yang diberikan oleh variabel yang berbeda di luar variabel pegangan pelaksanaan APBDes dan tidak diperhitungkan dalam model statistik.

Berdasarkan hasil pengujian, dengan menggunakan dimensi daya tarik tujuan, integrasi, antusiasme, dan kepuasan kerja dapat meningkatkan Efektivitas Kelangsungan Usaha. Menurut pengamatan lapangan, variabel tersebut memiliki dampak yang rendah. Implementasi Kebijakan APBDes terhadap Efektivitas Realisasi APBDes dapat disebabkan ketika kebijakan dilaksanakan dengan baik dalam bentuk program pembinaan, Ada komitmen yang kuat dari pelaksanaan tugas untuk melaksanakannya, dan Gubernur Negara memastikan agar tugas tersebut dilaksanakan seefisien mungkin, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi efektivitas APBD. Pertimbangan lain (epsilon).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, terdapat manfaat yang signifikan dari pelaksanaan APBDes terhadap pengelolaan APBDes dalam hal peningkatan efisiensi pelaksanaan APBDes di Garut.

Rangkuman Hasil dari pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pembahasan data disajikan sebagai:

- a. Variabel kebijakan APBDes menunjukkan kriteria “Sangat Baik”, terdapat pada dimensi Staf Sumberdaya dan Aparatur Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Pengelola APBDes menetapkan kriteria "Sangat Baik" untuk evaluasi. Indikator dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat pada dimensi “Pelaksanaan anggaran “Kepala Desa mengarahkan staf dan aparatur Desa agar memahami dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.”
- c. Realisasi efektivitas APBDes meliputi kriteria “Sangat Baik”; prioritas tertinggi terdapat pada dimensi “Kepala Desa melaksanakan Prioritas kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan

Hasil Pengujian Hipotesis disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan kebijakan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen Penggunaan APBDes untuk mewujudkan efektivitas Realisasi APBDes.

Hasil Pengujian Pada sub-sub Hipotesis sebagai berikut :

- a. Pengujian Subhipotesis 1, pelaksanaan kebijakan APBDes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen Penggunaan APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Penggunaan APBDes dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan APBDes.
- b. Pengujian Subhipotesis 2, manajemen Penggunaan APBDes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Realisasi APBDes. efektivitas Realisasi APBDes akan terwujud dengan optimal bila terdapat pengaruh manajemen Penggunaan APBDes yang baik.
- c. Pengujian Subhipotesis 3, pelaksanaan kebijakan APBDes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Realisasi APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Realisasi APBDes dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh pelaksanaan kebijakan APBDes.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AphaBeta..
- Abdullah. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Press Indonesia.
- Anggara, Sahya (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Fakta dalam Upaya Menciptakan Goodgovernment*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.*
- Iskandar, Jusman, (2017), *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel- variabel Sosial dan Psikologi*, Bandung: Puspaga.
- Iskandar Jusman, (2017), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: